



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu adanya kebijakan dan strategi tingkat kota dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah aerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah Kota Pekalongan yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja dibidang :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target dan Program

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Pekalongan dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Pekalongan dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penetrapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 32,05% (tiga puluh dua koma nol lima persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 66,84% (enam puluh enam koma delapan puluh empat persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman pada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur Jawa Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang di angkut ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses ditempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui;
 - a. Perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Kebijakan penanganan sampah yang sudah dilakukan sejak tahun 2022 merupakan bagian dari Jakstrada yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2019 tentang Tentang Kebijakan dan Setrategi Kota Pekalongan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Mei 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

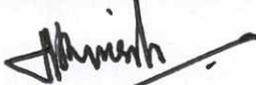
Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA
 PEKALONGAN DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PEKALONGAN

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

| INDIKATOR | TAHUN | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun) | 59.292,3 | 59.796,32 | 60.304,59 | 60.817,17 |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas | 26% | 27% | 28% | 30% |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 9.625,83 (16,23%) | 12.442,83 (20,81%) | 15.106,33 (25,05%) | 19.489,29 (32,05%) |

Keterangan : P = potensi timbulan sampah (ton/tahun)

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

| INDIKATOR | TAHUN | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun) | 59.292,3 | 59.796,32 | 60.304,59 | 60.817,17 |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas | 73% | 72% | 71% | 70% |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 46.492,81 (78,41%) | 44.302,81 (74,09%) | 42.842,81 (71,04%) | 40.652,81 (66,84%) |

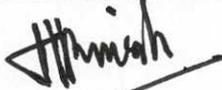
Keterangan : P = potensi timbulan sampah (ton/tahun)

WALIKOTA PEKALONGAN,
 Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAIID

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEKALONGAN DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

| No | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM/ KEGIATAN | SATUAN | TAHUN | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|----|---|--|---|---------|-------|------|------|------|-------------------------------------|--|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1. | Peningkatan kinerja dibidang pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | a) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | a. Peraturan Walikota tentang Perencanaan Pengelolaan Sampah di Wilayah RT dan RW | Dokumen | 1 | - | - | - | DLH, Bagian Tata Pemerintahan Setda | Bagian Hukum Setda, Kecamatan, Kelurahan |
| | | | b. Peraturan Walikota tentang Pengelola Kawasan Pemukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Lainnya Wajib Menyediakan Fasilitas Pemilahan Sampah dan/atau Pengolahan Sampah | Dokumen | 1 | - | - | - | DLH, DPM-PTSP, | Bagian Hukum Setda, DINDAGKOP-UKM, DINPERKIM |
| | | | c. Peraturan Walikota tentang Perizinan dalam Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah | Dokumen | 1 | - | - | - | DLH, DPM-PTSP | Bagian Hukum Setda, DINDAGKOP-UKM, DINPERKIM |
| | | | d. Surat Edaran Walikota tentang Pelaksanaan Jumat Bersih Setiap Bulan | Dokumen | 1 | - | - | - | DLH | Seluruh OPD Kota Pekalongan |
| | | | 2. Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali | | | | | | | |
| | | | a. Peraturan Walikota tentang Pengurangan dan Pengendalian Sampah Plastik | Dokumen | 1 | - | - | - | DLH Kota Pekalongan | Seluruh OPD Kota Pekalongan |
| | | | b. Surat Edaran Walikota tentang Jam Pembuangan sampah | Dokumen | - | 1 | - | - | DLH Kota Pekalongan | Seluruh OPD Kota Pekalongan |
| | | | c. Surat Edaran Walikota tentang Penggunaan Produk Daur Ulang | Dokumen | - | 1 | - | - | DLH Kota Pekalongan | Seluruh OPD Kota Pekalongan |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|----|------------------------|--|--|
| | | d. Surat Edaran Walikota tentang Pemanfaatan Kembali Sampah | Dokumen | - | 1 | - | - | DLH Kota Pekalongan | Seluruh OPD Kota Pekalongan |
| | b) penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | |
| | | a. Anggaran penanganan dan pengelolaan sampah | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah | | | | Bappeda, BPKAD dan DLH | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng, DPRD | |
| | c) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Pekalongan dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | Dokumen | - | 1 | - | - | DLH, DPRD | Bagian Hukum Setda, Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda |
| | d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | DLH Kota Pekalongan | KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR, BKD, DINPERKIM, Kecamatan dan Kelurahan. |
| | | 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | | | | | | | |
| | | a. Pembentukan Bank Sampah RW | Unit | 5 | 5 | 5 | 5 | DLH, Bagian Tata Pemerintahan Setda | Bagian Hukum Setda, Kecamatan, Kelurahan |
| | | b. Pembinaan pemulung | Orang/tahun | 25 | 25 | 25 | 25 | DLH | DINSOS P2KB |
| | e) pembentukan sistem informasi | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | |
| | | a. Pengembangan SIM Lingkungan | Aplikasi | 1 | - | - | - | DLH | DINKOMINFO |
| | f) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi | 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | | | | | | | |
| | | a. TPS3R | unit | 20 | 20 | 20 | 20 | DLH | KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR, BPKAD, Kecamatan dan Kelurahan. |
| | | b. Edukasi di tempat wisata dan hotel | Tempat wisata, | 5 | 5 | 5 | 5 | DINPARBUDPORA | DLH, Bappeda, BPKAD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | hotel | | | | | | | |
| | | c. Edukasi di pasar | pasar | 6 | 6 | 6 | 6 | DINDAGKOP-UKM | DLH, Bappeda, BPKAD | |
| | | d. Edukasi di rumah makan | Rumah makan | 25 | 25 | 25 | 25 | DINDAGKOP-UKM | DLH, Bappeda, BPKAD | |
| | | e. Edukasi di fasilitas kesehatan | Faskes | 5 | 5 | 5 | 5 | DINKES | DLH, Bappeda, BPKAD | |
| | | 2. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| | | a. Sekolah Adiwiyata | Sekolah | 2 | 2 | 2 | 2 | DINDIK | DLH, Bappeda, BPKAD | |
| | | g) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | | | | | | | |
| | | a. Pemberian penghargaan | TPS3R | 3 | 3 | 3 | 3 | DLH | Kecamatan dan Kelurahan. | |
| | | h) penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | | | | | | | |
| | | a. Surat Edaran Walikota tentang pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | - | 1 | - | - | DLH, DINDAGKOP-UKM, DINKES, DINDIK, DINPERINAKER, DINPARBUDPORA, | Seluruh OPD Kota Pekalongan | |
| 2. | Peningkatan kinerja dibidang penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | a) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | a. Penyusunan Kajian Pengelolaan Sampah | Dokumen | 1 | - | - | - | DLH | Bappeda, DPUPR, DINPERKIM, Kecamatan, Kelurahan | |
| | | b. Peraturan Walikota tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah | Dokumen | - | 1 | - | - | DLH | Bagian Hukum Setda, SATPOL P3KP | |
| | | b) penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | a. Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | Dokumen | - | 1 | - | - | DLH | DINDAGKOP-UKM, DINKES, DINDIK, DINPARBUDPORA, DINPERINAKER, Kecamatan, Kelurahan | |
| | | c) penguatan komitmen | Koordinasi dan Sinkronisasi | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|----|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Pekalongan dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | |
| | | a. Penguatan komunikasi eksekutif dan legeslatif dalam penanganan sampah | Pertemuan /tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH, DPRD | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng |
| | | b. Anggaran penanganan dan pengelolaan sampah | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah | | | | Bappeda, BPKAD dan DLH | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng, DPRD | |
| | d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | | | | | | | |
| | a. Fasilitasi Bank Sampah Induk | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | DLH | Bappeda, BPKAD | |
| | b. Pembinaan Bank Sampah Unit | Unit | 32 | 37 | 42 | 47 | DLH, Bagian Tata Pemerintahan Setda | Kecamatan, Kelurahan | |
| | e) pembentukan sistem informasi | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | Inputing data ke SIPSN | Kali | 2 | 2 | 2 | 2 | DLH | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jateng |
| | f) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi | 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | |
| | a. Sosialisasi pengelolaan sampah | Kali | 13 | 15 | 15 | 15 | DLH | DINDIK, DINKES, Kecamatan, Kelurahan | |
| | 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kota | | | | | | | | |
| b. Pengadaan dumptruck | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH | Bappeda, BPKAD | | |
| c. Kendaraan roda tiga | Unit | 7 | 7 | 1 | - | DLH | Bappeda, BPKAD | | |
| d. Jumlah kontainer | Unit | 15 | 5 | 5 | 5 | DLH | Bappeda, BPKAD | | |
| e. Jumlah peralatan kebersihan | Jenis | 10 | 10 | 10 | 10 | DLH | Bappeda, BPKAD | | |
| | 3. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | |
| a. Pembangunan zona 4 TPA | | - | - | - | 1 | DPUPR, DLH Kota Pekalongan | Bappeda, BPKAD, DPRD | | |
| g) penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------|----|----|----|-----|--------------------------------------|---|
| | h) penguatan penegakan hukum | 1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan pihak Swasta | | | | | | | | |
| | | a. Fasilitasi TPS3R | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | DLH | Bappeda, BPKAD, Kecamatan, Kelurahan | |
| | | i) penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Kota Pekalongan | 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | |
| | | | a. Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi | Lokasi | 25 | 25 | 25 | 25 | DLH | Kepolisian, Bagian Hukum Setda, SATPOL P3KP |
| | j) penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna | | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | |
| | | | a. Pengintegrasian pengurusan ijin penanganan sampah | rekomendasi | 5 | 5 | 5 | 5 | DPM-PTSP | DLH |
| | k) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kota | | | | | | | |
| | | | a. Alat pemilah sampah | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH | DPUPR, DIMPERKIM, Kecamatan, Kelurahan |
| | | | b. Revitalisasi TPS3R | unit | 2 | 5 | 5 | 3 | DLH, DPUPR | Bappeda, BPKAD, Kecamatan, Kelurahan |
| | | | a. Revisi perwal | Dokumen | - | - | 1 | - | DLH | Bagian Hukum Setda |

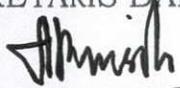
WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH